

## ABSTRAK

Fidusia hak kebendaan bersifat memberikan jaminan. Objek jaminannya benda bergerak berwujud, tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan. Jaminan fidusia banyak digunakan oleh perusahaan pembiayaan. Debitur wanprestasi, pihak leasing mengeksekusi objek fidusia secara sepihak, hal ini dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan uji materiil. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan secara langsung karena sita eksekutorial dalam sertipikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan telah dibatalkan. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD tahun 1945. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, tapi harus melalui putusan Pengadilan Negeri, kecuali ada kesepakatan mengenai cedera janji antara debitur dengan kreditur dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, hal ini berdampak kurangnya minat kreditur untuk memberikan pinjaman dengan objek barang bergerak mengingat proses eksekusi yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak karena eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan negeri. Notaris sebagai perumus perjanjian perlu berpikir secara cermat untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan menguatkan klausul dalam Akta Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat para pihak agar terjadi keseimbangan dalam hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Untuk itu penulis mengambil tema mengenai Peranan Notaris dalam pembuatan Akta-akta Notaris khususnya Akta jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan berupa data yuridis. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif dan jenis penelitian kualitatif.

## ABSTRACT

*Fiduciary material rights are guaranteed. The collateral objects are tangible, intangible and immovable objects that cannot be guaranteed with mortgages. Fiduciary collateral is widely used by finance companies. Debtor defaults, the leasing party executes fiduciary objects unilaterally, this is considered contrary to the 1945 Constitution. Article 15 paragraph (2) and Article 15 paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee is subjected to a material test. After Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019, Execution of fiduciary guarantees after the decision of the, after Constitutional Court, creditors cannot execution guarantee directly because executorial beslag in fiduciary certificate which have power same with court decision has been canceled. According to Constitutional Court's decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 states that Article 15 paragraph (2) and Article 15 paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 is contradictory to the 1945 Constitution. After the Constitutional Court's Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019 states that the execution of guarantees cannot be carried out unilaterally by creditors, but must be through a District Court decision, unless there is an agreement on breach of contract between the debtor and the creditor and the debtor voluntarily submits the object of fiduciary collateral, this matter impact to lack of creditor's interest to give loan with moveable object remember executory process need long time and many cost because execution object fiduciary guarantee must be district court decision. Notary as formulate's agreement must be think carefully to response Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 with strengthen clause in fiduciary guarantee deed based on credit agreement which has been made the parties so that occur balanced right and obligation between creditor and debtor. Therefore author take theme about Notary's role to make Notary's deeds especially fiduciary guarantee's deed after Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 with research's method use literature research in the form of juridical data. The research is normative juridical and qualitative research type Research methods.*